

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Adhuri, D. S. (2005). *Fishing Out: Memahami Konflik-Konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Anwar, C. (1989). *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan.
- Asikin, A. d. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aust, A. (2010). *Handbook of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Bruce, d. C. (1993). *The Politics of Exclusion: Indonesian Fishing in the Australian Fishing Zone*. Perth : Indian Ocean Centre for Peace Studies and the Australian Centre for International Agricultural Research.
- Djalal, H. (1997). *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- Fahrudin, M. A. (2018). *Legalitas hukum Kelautan dan Perikanan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Fox, J. (2002). "A Study of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The MOU Box"
- Indonesia, e. J. (2008). *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Mangku, D.G.S. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Ruas Media. Yogyakarta.
- Mangku, D.G.S. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten. Lakeisha
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mauna, B. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumnus.
- Parks, A. M. (2000). *Ashmore Reef National Natural Reserve and Cartier Island Marine Reserve Management Plans*. Canberra: Department of the Environment and Heritage .
- Parthiana, I. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

- Riry, W. A. (2023). *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ropingi, I. e. (2017). *Public Relations Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Publishing.
- Russel, B. C. (2004). *Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marines*. Department of Environment and Heritage Australia.
- Sodik, D. (2011). *Hukum Laut Internasional dalam Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono, S. d. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stacey, N. (2007). *Boats to Burn : Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Australia: Australian National University Press.
- Starke, J. (2001). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2015). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tribawono, H. D. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

**Artikel dalam Jurnal :**

- Adrianto, L. (2011). Nelayan Tradisional di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial Budaya. *Center for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University*.
- Alfiana. (2008). Sinkronisasi Nelayan Pelintas Batas Terkait MOU BOX 1974. Makalah disampaikan pada *Workshop Sinkronisasi Masalah Nelayan Pelintas Batas Terkait MOU BOX 1974*.
- Anderson, David, *Some Aspects of the Regime of Islands in The Law of The Sea, The International Journal of Marine and Coastal Law* 32, Leiden, 2017
- Awida, Maria Sari, Efektivitas MOU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016
- Christoforus, Gorbachev. Keabsahan Status Kepemilikan Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Berdasarkan UNCLOS 1982, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2015
- Dillak, Marni Agustina, dkk. (2023). Status Hukum Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan. *Jurnal Relasi Publik*, 70-84.
- Febrian, Seven. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum* Vol. XI No. 5

- Ilahi, A. F. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 49-57.
- Kantjai, M. (2019). Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 . *Lex Privatum Vol. VII/No. 1*, 100.
- Karyawan, K. A. P., dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Nelayan Tradisional Indonesia Dari Nusa Tenggara Timur di Pulau Pasir Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3 No. 4*
- Natamiharja, dkk. (2020). *Law Making Treaties: The Implication of International Law towards Indonesia's Legislations. Jambe Law Journal, Volume 3 .*
- Ratna, Indrawasih. dkk. (2010). Kerja Sama Bilateral dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 65.
- Solihin, Akhmad. (2010). Konflik *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. *Jurnal Marine Fisheries 1 (1)* 29-36
- Solihin, A. (2008). Penyelesaian Sengketa Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia.
- Quinn, N. J. (2014). *Traditional Methods of Fishing (Southwest Pacific) The Role of Food AgricultureE. Forestry and Fisheries in Human Nutrition*, 2.

#### **Artikel dalam Internet**

- Kompas.com. (2008). Mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional.
- Tim CNN Indonesia. 2022. *Kronologi Pulau Pasir NTT Diklaim Australia Bikin 'Ngamuk'*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221024114158-106-864549/kronologi-pulau-pasir-ntt-diklaim-australia-bikin-warga-ngamuk/2> pada tanggal 26 September 2024.

#### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

- Arub, Firmansyah. (2014). *Upaya Pemerintah Indonesia dan Australia dalam Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Pulau Pasir*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

#### **Konvensi Internasional :**

- Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 Ayat (1) tentang Sumber Hukum Internasional

Konvensi Laut Jenewa 1958 tentang Hukum Laut Internasional

*United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*

Konvensi Wina 1969

*Memorandum of Understanding BOX 1974*

*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries 1989*

*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981*

*Jakarta Treaty 1982*

